



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 82 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1,  
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah dokumen perencanaan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, hasil evaluasi Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun berjalan.

#### Pasal 4

(1) Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 82

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

RENCANA KERJA  
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun. Dari ketentuan tersebut OPD kemudian membuat Rencana Kerja (RENJA) dalam penyusunan Renja pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau bisa disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD mengacu dari RKPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan disamping itu juga pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada periode tahun 2018 - 2023.

Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan bagian yang menunjang program pembangunan yang ada pada Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2022 dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan. Tahap pertama perumusan rancangan Rencana Kerja Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Perumusan rancangan Rencana Kerja Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu Pengolahan data dan informasi, Analisis gambaran kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, Telaahan terhadap rancangan awal RKPD, Perumusan tujuan dan sasaran, Penelaahan usulan program dan

kegiatan dari masyarakat melalui Petugas Lapangan, Perumusan kegiatan prioritas, Penyajian awal dokumen rancangan Rencana Kerja Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Rencana Kerja SKPD Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan disusun melalui penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah yakni di tahun 2022 dengan tema “Kelembagaan Ekonomi Desa”,serta Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menjadi OPD Pendukung dalam pelaksanaan tersebut. Tema tersebut sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan tema yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten 2022 selaras dengan fokus pembangunan dengan Provinsi Jawa Timur yakni “Penguatan Sumber Daya untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Nantinya kegiatan-kegiatan yang ada berfokus untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang sudah ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
8. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
11. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Maret 2009 Nomor : 640/751/SJ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Musrenbang tahun 2010;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023;
  32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk periode 1 tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilingkup Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 adalah :

1. Menjamin konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan kebutuhan.
2. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan.
3. Memberi gambaran tentang rencana kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun anggaran 2022.
4. Memenuhi kebutuhan target kinerja sesuai kondisi sasaran program yang ditetapkan pemerintah.

- 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Maret 2009 Nomor : 640/751/SJ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Musrenbang tahun 2010;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023;
  32. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk periode 1 tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilingkup Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 adalah :

1. Menjamin konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan kebutuhan.
2. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan.
3. Memberi gambaran tentang rencana kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun anggaran 2022.
4. Memenuhi kebutuhan target kinerja sesuai kondisi sasaran program yang ditetapkan pemerintah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
2. **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. **BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**
  - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3 Program dan Kegiatan
4. **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
5. **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada tahun 2020, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 6 program dan 28 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman
- g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- h. Penyediaan Jasa Perkantoran
- i. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan :

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebelair
- d. Pengadaan Peralatan Kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor

**3. Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk**

Kegiatan :

- a. KIE dan Pelayanan KB
- b. Biaya Operasional KB
- c. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
- d. Meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB
- e. Pencatatan pelaporan dan pendataan keluarga
- f. Pembinaan Koalisi Kependudukan
- g. Sosialisasi Dimensi Kependudukan

**4. Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan**

Kegiatan :

- a. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- b. KIE Berbagai Media dan Mupen
- c. Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Konseling KRR
- d. Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS
- e. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## **5. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
- b. Pelatihan peningkatan keterampilan bagi organisasi perempuan dan masyarakat
- c. Evaluasi PUG
- d. Fasilitasi Perlindungan Perempuan
- e. Fasilitasi Perlindungan Anak
- f. Fasilitasi Kabupaten Layak Anak

## **6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial**

Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga dan Masyarakat.

Namun, dikarenakan di tahun 2021 nama program, kegiatan dan sub kegiatan harus disesuaikan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, jadi nama program dan kegiatan tahun 2020 dan 2021 berbeda. Berikut ini rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2020</b>										
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>200 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>		<b>200 %</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon / internet	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola aset, pelaku pengadaan barang / jasa	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pembelian ATK	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang cetak dan Penggandaan	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah pembelian mamin rapat dan tamu	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan	Jumlah penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	1 keg	0 keg	1 keg	1 keg	100%		1 keg	100%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR</b>	<b>Prosentase Sarana terhadap Prasarana yang tersedia</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>		<b>200</b>	<b>100%</b>
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		2 unit	100%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		2 unit	100%
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan Kantor	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		2 unit	100%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan Gedung Kantor	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kebutuhan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan Peralatan Kantor	24 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%		24 bln	100%
	<b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Peningkatan jumlah akseptor KB</b>	<b>7050 akseptor</b>	<b>0 akseptor</b>	<b>7050 akseptor</b>	<b>7050 akseptor</b>	<b>100%</b>		<b>7050 akseptor</b>	<b>100%</b>
	KIE dan pelayanan KB	Jumlah kegiatan pelayanan KIE dan pelayanan KB	51 keg	0 keg	51 keg	40 keg	78%		40 keg	78%
	Biaya operasional KB	Jumlah biaya BOKB	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100%		12 bln	50%
	Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah kegiatan pembinaan kader	12 keg	0 keg	3 keg	3 keg	100%		3 keg	25%
	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan dan penyuluhan KB	Jumlah sarana prasarana penyuluhan dan pelayanan KB	2 jenis	0 jenis	2 jenis	2 jenis	100%		2 jenis	67%
	Pencatatan pelaporan dan pendataan keluarga	Jumlah kegiatan pencatatan pelaporan dan PK	15 keg	0 keg	15 keg	5 keg	33%		5 keg	33%
	Pembinaan Koalisi Kependudukan	Jumlah kegiatan koalisi	3 keg	2 keg	1 keg	1 keg	100%		3 keg	100%
	Sosialisasi Dimensi Kependudukan	Jumlah sosialisasi dimensi kependudukan	2 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%		2 keg	100%
	<b>PROGRAM KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN PENGGERAKAN</b>	<b>Peningkatan Jumlah Desa Yang memiliki kelompok Tribina</b>	<b>10 kelompok</b>	<b>0 kelompok</b>	<b>10 kelompok</b>	<b>kelompok</b>	<b>0%</b>		<b>0 kelompok</b>	<b>0%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Jumlah kegiatan Pusyan Gatra	22 keg	0 keg	22 keg	22 keg	100%		22 keg	100%
	KIE Berbagai Media dan Mupen	Jumlah kegiatan KIE berbagai Media Mupen	22 bln	12 bln	12 bln	10 bln	83%		22 bln	100%
	Pengembangan pusat layanan informasi dan konseling KRR	Jumlah kegiatan PIK/KRR	30 keg	0 keg	30 keg	30 keg	100%		30 keg	100%
	pembinaan tri bina (BKB, BKR, BKL) dan UUPKS	Jumlah pembinaan tribina dan UPPKS	12 keg	0 keg	12 keg	12 keg	100%		12 keg	100%
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	24 kec	12 kec	12 kec	12 kec	100%		24 kec	100%
	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I</b>	<b>1000 kk</b>	<b>0 kk</b>	<b>1000 kk</b>	<b>kk</b>	<b>0%</b>		<b>0 kk</b>	<b>0%</b>
	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja	12 keg	6 keg	6 keg	6 keg	100%		12 keg	100%
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>Peningkatan jumlah anggaran yang responsif gender</b>	<b>25 %</b>	<b>0 %</b>	<b>25 %</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>		<b>0 %</b>	<b>0%</b>
		<b>presentase Kekerasan perempuan yang terselesaikan</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>		<b>100 %</b>	<b>100%</b>
		<b>presentase Kekerasan anak yang terselesaikan</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>		<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	Pelaksanaan KIE tentang keadilan dan kesetaraan gender (KKG)	Jumlah kegiatan KIE KKG	55 keg	0 keg	55 keg	50 keg	91%		50 keg	91%
	Pelatihan peningkatan ketrampilan bagi organisasi perempuan dan masyarakat	Jumlah organisasi perempuan dan masyarakat yang mendapat pelatihan	20 kelompok	0 kelompok	20 kelompok	15 kelompok	75%		15 kelompok	75%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi PUG	Jumlah kegiatan evaluasi PUG	4 keg	0 keg	4 keg	4 keg	100%		4 keg	100%
	Fasilitasi perlindungan perempuan	Jumlah perempuan yang terfasilitasi	25 orang	0 orang	25 orang	25 orang	100%		25 orang	100%
	Fasilitasi perlindungan anak	Jumlah anak yang terfasilitasi	30 orang	0 orang	30 orang	30 orang	100%		30 orang	100%
	Fasilitasi kabupaten layak anak	Jumlah OPD yang tersosialisasi tentang KLA	56 opd	0 opd	56 opd	56 opd	100%		56 opd	100%
<b>2021</b>										
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja</i>	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	100%
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yg dilaksanakan</i>	100 %	0 %	0 %	0 %	0	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	12 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin	100 %	0 %	0 %	0 %	0	100 %	100 %	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	50 Orang	50 Orang	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	0 %	0 %	0 %	0	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	62 unit	62 unit	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	15 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	15 unit	15 unit	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	62 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	62 Laporan	62 Laporan	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	5 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	5 unit	5 unit	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	2 unit	2 unit	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	2 unit	2 unit	100%
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	0 %	0 %	0 %	0	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	36 Rekening	0 Rekening	0 Rekening	0 Rekening	0	36 Rekening	36 Rekening	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</i>	14 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	14 unit	14 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	11 unit	11 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	2 unit	2 unit	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
	<b>Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Persentase dokumen PPRG yang disampaikan</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	<i>Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kelompok pelaksana kegiatan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	62 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0	62 Kelompok	62 Kelompok	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	56 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti rakor PUG	60 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	60 orang	60 orang	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	56 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0	56 Perangkat Daerah	56 Perangkat Daerah	100%
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kebijakan PUG termasuk PPRG	200 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	200 orang	200 orang	100%
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan</i>	19 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0	19 Kelompok	19 Kelompok	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	19 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0	19 Kelompok	19 Kelompok	100%
	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase Kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah peserta yang mengikuti pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</i>	154 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	154 orang	154 orang	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti rakor tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	154 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	154 orang	154 orang	100%
	<i>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani</i>	110 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	110 orang	110 orang	100%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mengadu dan terlayani	110 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	110 orang	110 orang	100%
	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	<i>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti rakor Pelembagaan PHA</i>	80 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	80 orang	80 orang	100%



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru</b>	100 %	0 %	0 %	0 %	0	100 %	100 %	100%
	<i>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	<i>Jumlah kecamatan yang mengikuti Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	24 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0	24 Kecamatan	24 Kecamatan	100%
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	jumlah masyarakat/kader IMP yang mendapat sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Kependudukan	15 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	15 Orang	15 Orang	100%
	<i>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten</i>	24 kecamatan	0 kecamatan	0 kecamatan	0 kecamatan	0	24 kecamatan	24 kecamatan	100%
	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah tim koalisi kependudukan tingkat kabupaten yang menyusun parameter kependudukan	1 tim	0 tim	0 tim	0 tim	0	1 tim	1 tim	100%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan dalap dan pelkon yang tervalidasi	24 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	24 laporan	24 laporan	100%
	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru</b>	100 %	0 %	0 %	0 %	0	100 %	100 %	100%
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Jumlah kecamatan yang diberikan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	24 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0	24 Kecamatan	24 Kecamatan	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan KIE Program KKBPK	94 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	94 orang	94 orang	100%
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah kebutuhan pengelolaan operasional dan sarana balai kb	12 bln	0 bln	0 bln	0 bln	0	12 bln	12 bln	100%
	<i>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Pendayagunaan Tenaga Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	24 kecamatan	0 kecamatan	0 kecamatan	0 kecamatan	0	24 kecamatan	24 kecamatan	100%
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah kebutuhan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	4 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0	4 jenis	4 jenis	100%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang mendukung pelaksanaan program KB	2753 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	2753 orang	2753 orang	100%
	<i>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kecamatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksana layanan KB</i>	24 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0	24 Kecamatan	24 Kecamatan	100%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi	49 faskes	0 faskes	0 faskes	0 faskes	0	49 faskes	49 faskes	100%
	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan sosialisasi penggunaan KB MKJP	501 org	0 org	0 org	0 org	0	501 org	501 org	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah faskes yang mengikuti pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	33 faskes	0 faskes	0 faskes	0 faskes	0	33 faskes	33 faskes	100%
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor/ peserta KB yang terlayani	264 org	0 org	0 org	0 org	0	264 org	264 org	100%
	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	<i>Jumlah pelaksana pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB</i>	24 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0	24 Kecamatan	24 Kecamatan	100%
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang melaksanakan program bangga kencana	24 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0	24 Kecamatan	24 Kecamatan	100%
	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>Persentase Dimensi Ketentraman</b>	<b>20,20 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>20,20 %</b>	<b>20,20 %</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase Dimensi Kemandirian</b>	<b>17,68 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>17,68 %</b>	<b>17,68 %</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase Dimensi Kebahagiaan</b>	<b>13,89 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>13,89 %</b>	<b>13,89 %</b>	<b>100%</b>
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah orang yang mengikuti pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	506 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	506 orang	506 orang	100%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	506 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	506 Orang	506 Orang	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga</i>	24 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0	24 Kecamatan	24 Kecamatan	100%
	<i>Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan yg melakukan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Tribina,PIK-R dan UPPKS)</i>	24 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0	24 Kecamatan	24 Kecamatan	100%
	<i>Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</i>	<i>Jumlah orang yang mengikuti promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	132 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	132 Orang	132 Orang	100%

Penjelasan dari tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

- a. Awalnya pada tahun awal renstra yakni tahun 2019 terdapat 17 Program dan 60 kegiatan, namun pada tahun 2020 hingga 2023 menjadi 6 program dan 28 kegiatan yang menyebabkan banyak nama program kegiatan berubah, sehingga jika dilihat dari kolom no 11 ada kegiatan yang tidak mencapai 100% dikarenakan di tahun 2019 kegiatan tersebut tidak ada.
- b. Terdapat perbedaan nama program dan kegiatan di tahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Jadi jika di tahun 2020 terdapat nama Program dan Kegiatan, maka di Tahun 2021 terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan juga sudah sesuai dengan Kepmendagri No. 050 tahun 2020 mengenai Pemutakhiran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- c. Di Tahun 2020 terdapat kegiatan yang capaiannya dibawah 90%, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga kegiatan yang mendatangkan massa tidak diperbolehkan dan menyebabkan capaian kinerja tidak maksimal dalam melakukan kegiatan.

Untuk mengatasi agar evaluasi capaian kinerja bisa maksimal di tahun berikutnya, maka perlu upaya sebagai berikut :

- a. Dikarenakan adanya pandemi covid-19, perlu penyesuaian target dikarenakan adanya pembatasan jumlah orang yang mengikuti kegiatan, sehingga bisa mencapai target maksimal.
- b. Memaksimalkan anggaran dan kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan lokus dan sesuai tema pembangunan Kabupaten Pasuruan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan data pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2020 terdapat 5 indikator kinerja yakni :

- a. Nilai Sakip OPD
- b. Prosentase Anggaran Responsive Gender
- c. Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- d. Prosentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I
- e. Prosentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menjadi Peserta KB Aktif.

Namun Pada tahun 2021 nantinya, Indikator Prosentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I diganti menjadi Indeks Pembangunan Keluarga berdasarkan Target dari BKKBN Pusat dan Indikator Pra-S KS-I dihapus dan diganti indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IPK).

Berikut ini tabel pencapaian pelayanan kinerja perangkat daerah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan  
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP OPD	-		80,80	80,90	81,00	81,10	80,79	80,90	81,00	81,10	
2	Prosentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menjadi Peserta KB Aktif (PA)	66,00		75,20	75,00	75,20	75,40	74,91	75,00	75,20	75,40	
3	Prosentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	-		40,00	-	-	-	39,72	-	-	-	Indikator Prosentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I tidak digunakan lagi di BKKBN, diganti dengan Prosentase Indeks Pembangunan Keluarga
4	Prosentase Indeks Pembangunan Keluarga	51,21		-	51,25	51,75	52,25	-	51,25	51,75	52,25	
5	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	3,40 (Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO) *target tahun 2019		0,0060	0,0055	0,0050	0,0045	0,0063	0,0055	0,0050	0,0045	
6	Prosentase Anggaran Responsive Gender	IPG dari PP-PA target 92,00%		19,98	18,50	18,60	18,70	18,31	18,50	18,60	18,70	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

1. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk :
  - a. Rendahnya ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 21,03% tahun 2020
  - b. Tingginya *Unmet Need* 10,58%, belum mencapai target 8,17% tahun 2020

Untuk menghadapi permasalahan dan kendala tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya :

- 1) Peningkatan cakupan akseptor MKJP melalui optimalisasi dana operasional keluarga berencana, memperbanyak sosialisasi tentang keberhasilan MKJP dan bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan keyakinan tentang penggunaan alat kontrasepsi khususnya MKJP.
  - 2) Melakukan sosialisasi dan pemahaman pentingnya ber KB kepada masyarakat dengan meningkatkan faktor kualitas penyuluhan Petugas Lapangan KB sesuai dengan program dan kegiatan Keluarga Berencana, serta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang masih minim pengetahuan pentingnya ikut KB dengan bekerja sama tokoh masyarakat dan tokoh agama di daerah tersebut.
2. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan
    - a. Adanya perkawinan usia muda dibawah 20 tahun bagi wanita : 21,80%.
    - b. Masih banyak Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang belum aktif untuk menghadapi permasalahan dan kendala tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya :
      - 1) Meningkatkan tujuan terciptanya Keluarga berkualitas melalui kesertaan ber-KB
      - 2) Mempercepat duplikasi dan memastikan keterlaksanaan inovasi *Multilevel Marketing* Generasi Berencana (MLM GenRe) disetiap kecamatan dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini.
      - 3) Melakukan sosialisasi dan arahan kepada kelompok-kelompok BKB,BKL,BKR dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang efektivitas kelompok tersebut.
  3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah :
    - a. Masih banyak anggaran OPD yang belum di analisis dan dibuat PPRG.
    - b. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anakUntuk menghadapi permasalahan dan kendala tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya :
    - 1) Meningkatkan peran serta masyarakat,OPD terkait dan *stakeholder* dalam kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada Bupati dan lintas OPD dalam penganggaran yang *responsive gender* demi mewujudkan Pasuruan *responsive gender*
    - 2) meningkatkan peran tim driver dengan penganggaran OPD

- 3) Meningkatkan sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada tahun 2020 Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan memiliki 6 Program dan 36 Kegiatan. Untuk tahun 2022 karena program,kegiatan harus menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050/3708 Tahun 2020, ada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Penyesuaian tersebut mengakibatkan banyak nama program kegiatan di tahun 2020 tidak sesuai dengan peraturan tersebut setelah dilakukan pemetaan nama program,kegiatan dan sub kegiatan. Dan dikarenakan di tahun 2022 ini Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan OPD Pendukung dalam tema arah kebijakan “Kelembagaan Ekonomi Desa”. Maka hasil rancangan awal RKPD terdapat perbedaan output dan anggaran. Hal ini dikarenakan kita menyesuaikan anggaran di tahun 2021 sebelumnya khususnya di DAK FISIK KB dan DAK NON FISIK BOKB serta berdasarkan tupoksi dinas, di tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat dana DBHCHT.

Adapun program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah :DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. PASURUAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.788.385.400</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5.149.943.148</b>	
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja perangkat daerah</i>	<i>5 dokumen</i>	<i>118.234.600</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja perangkat daerah</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>31.499.300</i>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	16.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	16.499.300	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	2 laporan	101.734.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	2 laporan	15.000.000	
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yg dilaksanakan</i>	<i>100%</i>	<i>5.986.534.730</i>	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yg dilaksanakan</i>	<i>100%</i>	<i>4.660.896.729</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	5.017.482.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	3.156.096.729	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	12 bln	969.051.930	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	12 bln	1.504.800.000	
3	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin</i>	<i>100%</i>	<i>55.500.000</i>	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin</i>	<i>100%</i>	<i>19.993.500</i>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	55.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	19.993.500	
4	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pemenuhan administrasi umum</i>	<i>100%</i>	<i>222.116.070</i>	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pemenuhan administrasi umum</i>	<i>100%</i>	<i>68.089.800</i>	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62 unit	24.200.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62 unit	24.341.400	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	15 unit	143.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	12 unit	18.745.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	62 laporan	54.916.070	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	72 laporan	25.003.000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	5 unit	70.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	8 unit	80.497.250	
	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan mebel	2 unit	5.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah pengadaan mebel	2 unit	5.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit	59.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit	50.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 unit	5.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 unit	24.997.250	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	176.500.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	177.432.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	36 rekening	99.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	36 rekening	99.982.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	12 bln	77.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	12 bln	77.450.000	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	14 unit	159.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	18 unit	111.534.369	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit	132.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit	74.999.100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	1 unit	16.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	1 unit	16.497.669	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	2 unit	11.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	2 unit	20.037.600	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
	<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
<b>1</b>	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>		<b>Persentase dokumen PPRG yang disampaikan</b>	<b>100%</b>	<b>596.500.000</b>	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>		<b>Persentase dokumen PPRG yang disampaikan</b>	<b>100%</b>	<b>252.719.612</b>	
1	<i>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kelompok pelaksana kegiatan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>62 kelompok</i>	<i>161.000.000</i>	<i>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kelompok pelaksana kegiatan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>62 kelompok</i>	<i>151.998.692</i>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Pasuruan	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	56 PD	59.750.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Pasuruan	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	55 PD	29.999.864	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti rakor PUG	60 orang	19.250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti rakor PUG	80 orang	49.999.900	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Pasuruan	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	56 PD	22.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Pasuruan	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	55 PD	21.998.928	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (*kegiatan evaluasi PUG 2 tahun sekali, 2023 tidak ada)	Kab. Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kebijakan PUG termasuk PPRG	200 orang	60.000.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (*kegiatan evaluasi PUG 2 tahun sekali, 2023 tidak ada)	Kab. Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kebijakan PUG termasuk PPRG	200 orang	50.000.000	

2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan	19 Kelompok	435.500.000	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan	2 Kelompok	100.720.920	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pasuruan	Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	19 Kelompok	435.500.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pasuruan	Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2 Kelompok	100.720.920	
2	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>		<b>Persentase Kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>77.000.000</b>	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>		<b>Persentase Kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>265.046.000</b>	
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah peserta yang mengikuti pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	154 orang	27.500.000	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah peserta yang mengikuti pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	154 orang	81.810.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti rakor tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	154 orang	27.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti rakor tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	154 orang	81.810.000	
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani	110 orang	49.500.000	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani	110 orang	183.236.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mengadu dan terlayani	110 orang	49.500.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mengadu dan terlayani	110 orang	183.236.000	
3	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>		<b>Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>63.500.000</b>	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>		<b>Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>161.342.100</b>	

1	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti rakor Pelembagaan PHA	80 orang	16.500.000	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti rakor Pelembagaan PHA	120 orang	114.342.250
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak di kabupaten	80 orang	16.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak di kabupaten	120 orang	114.342.250
2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	24 kecamatan	47.000.000	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	24 kecamatan	46.999.850
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	300 orang	47.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	300 orang	46.999.850
4	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>		<b>Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>22.000.000</b>	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>		<b>Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>159.851.540</b>
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Pertindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah pelaksana penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan pertindungan khusus	24 kecamatan	22.000.000	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Pertindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah pelaksana penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan pertindungan khusus	24 kecamatan	159.851.540
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah anak korban kekerasan yang mengadu dan terlayani	55 orang	11.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah anak korban kekerasan yang mengadu dan terlayani	55 orang	148.851.640

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah anggota tim PPT-PPA Kabupaten dan pokja kecamatan melaksanakan rakor pendampingan anak	70 orang	11.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah anggota tim PPT-PPA Kabupaten dan pokja kecamatan melaksanakan rakor pendampingan anak	70 orang	10.999.900	
	<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					
1	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru</b>	<b>100%</b>	<b>90.755.000</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>	
1	<i>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>		Jumlah kecamatan yang mengikuti Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	24 Kecamatan	5.500.000	<i>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>		Jumlah kecamatan yang mengikuti Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	24 Kecamatan	5.500.000	
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Pasuruan	jumlah masyarakat/kader IMP yang mendapat sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Kependudukan	15 orang	5.500.000	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Pasuruan	jumlah masyarakat/kader IMP yang mendapat sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Kependudukan	120 orang	5.500.000	
2	<i>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten</i>	24 Kecamatan	85.255.000	<i>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten</i>	24 Kecamatan	29.500.000	

	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Pasuruan	Jumlah tim koalisi kependudukan tingkat kabupaten yang menyusun parameter kependudukan	1 tim	5.500.000	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Pasuruan	Jumlah tim koalisi kependudukan tingkat kabupaten yang menyusun parameter kependudukan	1 tim	5.500.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan dalap dan pelkon yang tervalidasi	24 laporan	79.755.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan dalap dan pelkon yang tervalidasi	24 laporan	24.000.000	
<b>2</b>	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru</b>	<b>100%</b>	<b>8.938.512.000</b>	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru</b>	<b>100%</b>	<b>7.864.271.283</b>	
1	<i>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>		<i>Jumlah kecamatan yang diberikan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>24 Kecamatan</i>	<i>1.454.200.000</i>	<i>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>		<i>Jumlah kecamatan yang diberikan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>24 Kecamatan</i>	<i>1.563.730.340</i>	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	Kab. Pasuruan	jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan KIE Program KKBPK	94 orang	22.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	Kab. Pasuruan	jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan KIE Program KKBPK	160 orang	21.999.900	
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Kab. Pasuruan	Jumlah kebutuhan pengelolaan operasional dan sarana balai kb	12 bln	1.432.200.000	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Kab. Pasuruan	Jumlah kebutuhan pengelolaan operasional dan sarana balai kb	12 bln	1.541.730.440	
2	<i>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>		<i>Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>24 Kecamatan</i>	<i>4.603.632.000</i>	<i>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>		<i>Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>24 Kecamatan</i>	<i>1.852.672.000</i>	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Pasuruan	Jumlah kebutuhan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	jenis	2.115.300.000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Pasuruan	Jumlah kebutuhan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	2 jenis	34.672.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Pasuruan	Jumlah kader IMP yang mendukung pelaksanaan program KB	2753 orang	2.488.332.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Pasuruan	Jumlah kader IMP yang mendukung pelaksanaan program KB	2753 orang	1.818.000.000	
3	<i>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kecamatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksana layanan KB</i>	<i>24 Kecamatan</i>	<i>1.560.680.000</i>	<i>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kecamatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksana layanan KB</i>	<i>24 Kecamatan</i>	<i>3.231.268.943</i>	

	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pasuruan	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi	49 faskes	64.680.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pasuruan	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi	49 faskes	1.205.214.350
	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pasuruan	Jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan sosialisasi penggunaan KB MKJP	501 orang	1.446.500.000	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Pasuruan	Jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan sosialisasi penggunaan KB MKJP	500 orang	1.976.555.000
	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Pasuruan	Jumlah faskes yang mengikuti pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	49 faskes	16.500.000	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Pasuruan	Jumlah faskes yang mengikuti pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	44 faskes	16.499.800
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Pasuruan	Jumlah akseptor/ peserta KB yang terlayani	264 orang	33.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Pasuruan	Jumlah akseptor/ peserta KB yang terlayani	300 orang	32.999.793
4	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>		<i>Jumlah pelaksana pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB</i>	<i>24 Kecamatan</i>	<i>1.320.000.000</i>	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>		<i>Jumlah pelaksana pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB</i>	<i>24 Kecamatan</i>	<i>1.216.600.000</i>
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Pasuruan	Jumlah kampung KB yang melaksanakan program bangga kencana	24 Kecamatan	1.320.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Pasuruan	Jumlah kampung KB yang melaksanakan program bangga kencana	24 Kecamatan	1.216.600.000
3	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>		<b>Persentase Dimensi Ketentraman</b>	<b>20,20%</b>	<b>605.000.000</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>		<b>Persentase Dimensi Ketentraman</b>	<b>20,20%</b>	<b>605.000.000</b>
			<b>Persentase Dimensi Kemandirian</b>	<b>17,68%</b>	<b>550.000.000</b>			<b>Persentase Dimensi Kemandirian</b>	<b>17,68%</b>	-
			<b>Persentase Dimensi Kebahagiaan</b>	<b>13,89%</b>	<b>22.000.000</b>			<b>Persentase Dimensi Kebahagiaan</b>	<b>13,89%</b>	<b>22.000.000</b>

1	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Jumlah orang yang mengikuti pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	506 orang	605.000.000	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Jumlah orang yang mengikuti pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	500 orang	605.000.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Kab. Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	506 orang	605.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Kab. Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	300 orang	605.000.000	
2	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga</i>	24 Kecamatan	572.000.000	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga</i>	24 Kecamatan	22.000.000	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	132 orang	22.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	150 orang	22.000.000	
			<b>TOTAL</b>		<b>17.753.652.400</b>			<b>TOTAL</b>		<b>14.515.173.683</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja tahunan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan disusun melalui forum MUSRENBANGDES, forum MUSRENBANGCAM dan forum Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). *Stakeholder* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Rancangan Rencana Kerja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbang kabupaten untuk mematangkan/memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun rencana kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, selain harus mempedomani Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, juga harus mempertimbangkan hasil MUSRENBANGKAB/RKPD Final. Usulan dari Masyarakat pada kegiatan musrenbangcam dan forum OPD berasal dari PIK Remaja, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), PKK, Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), PPT-PPA, Kepolisian, Kodim, unsur OPD terkait, Kementerian Agama, Petugas Lapangan KB dan Penyuluh KB yang secara substansial mengusulkan kegiatan pembinaan PPKBD/Sub PPKBD, pembinaan dan pelatihan organisasi masyarakat dan organisasi perempuan, pembinaan TRIBINA (BKB/BKL/BKR/PIK-R) dan UPPKS, media KIE bagi kader, pembinaan forum anak, penanganan kekerasan perempuan dan anak dan pendampingan korban kekerasan.

Usulan tersebut di pilah-pilah kembali sesuai dengan tupoksi dinas, yakni menyesuaikan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan isu-isu yang terkait, serta menyesuaikan tema arah kebijakan pembangunan tahun 2022 yakni Kelembagaan Ekonomi Desa dan kemudian dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022. Usulan masyarakat juga menyesuaikan dengan anggaran Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

**Tabel 2.4**  
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Keluarga Berencana dan Pembebrdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
	<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
<b>1</b>	<b>Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>		<b>Persentase dokumen PPRG yang disampaikan</b>	<b>100%</b>	
1	<i>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kelompok pelaksana kegiatan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>62 kelompok</i>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab Pasuruan	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	55 PD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti rakor PUG	60 orang	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab Pasuruan	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	56 PD	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab Pasuruan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kebijakan PUG terasuk PPRG	200 orang	
2	<i>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan</i>	<i>2 Kelompok</i>	

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kecamatan Pasrepan, Rembang	Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2 Kelompok	
<b>2</b>	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>		<b>Persentase Kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	
1	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah peserta yang mengikuti pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</i>	<i>154 orang</i>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab Pasuruan	Jumlah orang yang mengikuti rakor tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	154 orang	
2	<i>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani</i>	<i>110 orang</i>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 kecamatan	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mengadu dan terlayani	110 orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 kecamatan	Jumlah pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan	24 kecamatan	
<b>3</b>	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>		<b>Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	
1	<i>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		<i>jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti rakor Pelembagaan PHA</i>	<i>120 orang</i>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Pasuruan	jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak di kabupaten	120 orang	
2	<i>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</i>	<i>24 kecamatan</i>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24 kecamatan	jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	300 orang	

4	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>		<b>Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	
	<i>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>jumlah pelaksana penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</i>	<i>24 kecamatan</i>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24 kecamatan	Jumlah anak korban kekerasan yang mengadu dan terlayani	55 orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Pasuruan	Jumlah anggota tim PPT-PPA Kabupaten dan pokja kecamatan melaksanakan rakor pendampingan anak	70 orang	
	<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				
1	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru</b>	<b>100%</b>	
1	<i>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>		Jumlah kecamatan yang mengikuti Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>24 Kecamatan</i>	
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kab Pasuruan	jumlah masyarakat/kader IMP yang mendapat sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Kependudukan	120 orang	
2	<i>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten</i>	<i>24 Kecamatan</i>	
	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab Pasuruan	Jumlah tim koalisi kependudukan tingkat kabupaten yang menyusun parameter kependudukan	1 tim	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	24 Kecamatan	Jumlah laporan dalap dan pelkon yang tervalidasi	24 laporan	

<b>2</b>	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru</b>	<b>100%</b>	
1	<i>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>		<i>Jumlah kecamatan yang diberikan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>24 Kecamatan</i>	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	Kecamatan Beji	jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan KIE Program KKBPK	160 orang	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab Pasuruan	Jumlah penyediaan dan distribusi sarana KIE Program KKBPK	12 bln	
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	22 Balai KB	Jumlah kebutuhan pengelolaan operasional dan sarana balai kb	12 bln	
2	<i>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)</i>		<i>Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)</i>	<i>24 Kecamatan</i>	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	24 Kecamatan	Jumlah kebutuhan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	2 jenis	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	24 Kecamatan	Jumlah kader IMP yang mendukung pelaksanaan program KB	2753 orang	
3	<i>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah kecamatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksana layanan KB</i>	<i>24 Kecamatan</i>	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Kecamatan	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi	49 faskes	
	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24 Kecamatan	Jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan sosialisasi penggunaan KB MKJP	500 orang	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Balai KB Lekok dan Lumbang, RSUD Grati	Jumlah penyediaan sarana penunjang untuk pelayanan kb	3 unit	
	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	24 Kecamatan	Jumlah faskes yang mengikuti pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	44 faskes	

	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	24 Kecamatan	Jumlah akseptor/ peserta KB yang terlayani	300 orang	
4	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>		<i>Jumlah pelaksana pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB</i>	24 Kecamatan	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	24 Kecamatan	Jumlah kampung KB yang melaksanakan program bangga kencana	24 Kecamatan	
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>		<b>Persentase Dimensi Ketentraman</b>	<b>20,20%</b>	
			<b>Persentase Dimensi Kemandirian</b>	<b>17,68%</b>	
			<b>Persentase Dimensi Kebahagiaan</b>	<b>13,89%</b>	
1	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Jumlah orang yang mengikuti pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	500 orang	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 lokus stunting	Jumlah pengadaan sarana poktan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	20 unit	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 lokus stunting	Jumlah kebutuhan operasional bagi poktan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	10 desa	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	24 kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	300 orang	
2	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga</i>	24 Kecamatan	

	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	24 Kecamatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yg melakukan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Tribina,PIK-R dan UPPKS)	24 Kecamatan	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	24 kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	150 orang	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan (umum) Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 21,03% tahun 2020
2. Tingginya *Unmet Need* 10,58%, belum mencapai target 8,17% tahun 2020
3. Adanya perkawinan usia muda dibawah 20 tahun bagi wanita : 21,80%.
4. Masih banyak anggaran OPD yang belum di analisis dan dibuat PPRG.
5. Masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak
6. Masih terjadi kesenjangan gender karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gender

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Merujuk pada **Misi ke 5** yaitu **Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Pemukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan**, maka tujuan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut :

##### 1. Tujuan

Berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tujuan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 2018-2023 yang merujuk pada sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan nomor 5.1.1 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

##### 2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas
- d. Meningkatnya Kesertaan ber-KB.

Dalam menentukan sasaran perlu adanya indikator sasaran antara lain :

**Sasaran pertama** (Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah) , mempunyai indikator sasarannya sebagai berikut :

1. Nilai Sakip OPD

**Sasaran kedua** (Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

1. Presentase anggaran yang responsive gender

2. Presentase kekerasan terhadap perempuan dan anak

**Sasaran ketiga** (Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

1. Presentase Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

**Sasaran keempat** (Meningkatnya Kesertaan ber-KB) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

1. Presentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif

### **3.3. Program dan Kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022**

Dari awalnya tahun 2021 sesuai di Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan terdapat Program sejumlah 6 dan Kegiatan sebanyak 36 kegiatan. Namun, di pertengahan tahun 2020 terdapat kebijakan dari pusat untuk nama program dan kegiatan harus sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sehingga Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan setelah melakukan pemetaan tersebut, di tahun 2021 terdapat 8 program, 21 kegiatan dan 44 sub kegiatan sesuai dengan 2 urusan, yakni urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berikut ini program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3 Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  - 5 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 9 Pengadaan Mebel
  - 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6 Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 15 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 16 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

### **2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

- 8 Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 17 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
  - 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 19 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - 20 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (\*kegiatan evaluasi PUG 2 tahun sekali, 2023 tidak ada)
- 9 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 21 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

### **3. Program Perlindungan Perempuan**

- 10 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - 22 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 11 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekekrasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 23 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekekrasan Kewenangan Kabupaten/Kota

### **4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

- 12 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 24 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 13 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 25 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## **5. Program Perlindungan Khusus Anak**

- 14 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 26 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 27 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

## **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**

### **6. Program Pengendalian Penduduk**

- 15 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 28 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
- 16 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- 29 Perumusan Parameter Kependudukan
- 30 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

### **7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

- 17 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 31 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal
- 32 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
- 18 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- 33 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- 34 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 19 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
- 35 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 36 Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- 37 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- 39 Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
- 40 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- 20 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 41 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

### **8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

- 20 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 42 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)
- 21 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 43 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 44 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Untuk program, kegiatan serta sub kegiatan dan outputnya yang dilaksanakan juga menyesuaikan sesuai dengan tema arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Di tahun 2022 ini adalah tema “Kelembagaan Ekonomi Desa”, Dinas Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan sebagai OPD Pendukung pelaksanaan kelembagaan ekonomi desa dengan proses pendukung Pelayanan KB yg berkualitas & Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. Nantinya kegiatan-kegiatan tersebut berfokus pada 24 kecamatan dan ada yang di tingkat Kabupaten Pasuruan. Berikut ini tabel rencana program kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan 2023.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. PASURUAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	5.149.943.148				5.914.937.463
X.XX.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja perangkat daerah		5 dokumen	Rp 31.499.300			5 dokumen	Rp 34.649.230
X.XX.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kab. Pasuruan	3 dokumen	Rp 16.499.300	DAU		3 dokumen	Rp 18.149.230
					Belanja operasi : Rp 16.499.300				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 16.499.300				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				

X.XX.01.2.01.0 7	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Kab. Pasuruan	2 laporan	Rp 15.000.000	DAU		2 laporan	Rp 16.500.000
						Belanja operasi : Rp 15.000.000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 15.000.000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
X.XX.01.2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yg dilaksanakan		100%	Rp 4.660.896.729			100%	Rp 5.126.986.402
X.XX.01.2.02.0 1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	100%	Rp 3.156.096.729	DAU		100%	Rp 3.471.706.402
						Belanja operasi : Rp 3.156.096.729				
						Belanja pegawai : Rp 3.156.096.729				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

X.XX.01.2.02.0 2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kab. Pasurua n	100%	Rp 1.504.800.000	DAU	100%	Rp 1.655.280.000
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 1.504.800.000			
					<i>Belanja pegawai</i> :			
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp 1.504.800.000			
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -			
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp -			
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -			
					<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -			
					<i>Belanja modal</i> : Rp -			
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -			
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -			
X.XX.01.2.05	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin		100%	Rp 19.993.500		100%	Rp 21.992.850
X.XX.01.2.05.0 9	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Pasurua n	2 orang	Rp 19.993.500	DAU	2 orang	Rp 21.992.850
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 19.993.500			
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp -			
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp 19.993.500			
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -			
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp -			
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -			
					<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -			
					<i>Belanja modal</i> : Rp -			

					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
					Belanja transfer	:	Rp	-				
X.XX.01.2.06	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%			Rp	68.089.800			100%	Rp 74.898.780
X.XX.01.2.06.01	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	62 unit			Rp	24.341.400	DAU		62 unit	Rp 26.775.540
					Belanja operasi	:	Rp	24.341.400				
					Belanja pegawai	:	Rp	-				
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	24.341.400				
					Belanja bunga	:	Rp	-				
					Belanja subsidi	:	Rp	-				
					Belanja hibah	:	Rp	-				
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
					Belanja modal	:	Rp	-				
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
					Belanja transfer	:	Rp	-				
X.XX.01.2.06.05	2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pasuruan	12 unit			Rp	18.745.400	DAU		12 unit	Rp 20.619.940
					Belanja operasi	:	Rp	18.745.400				
					Belanja pegawai	:	Rp	-				
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	18.745.400				
					Belanja bunga	:	Rp	-				
					Belanja subsidi	:	Rp	-				
					Belanja hibah	:	Rp	-				
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
					Belanja modal	:	Rp	-				

X.XX.01.2.06.0 9					Belanja tidak terduga	:	Rp -				
					Belanja transfer	:	Rp -				
		3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kab. Pasuruan	72 laporan			Rp 25.003.000	DAU		72 laporan Rp 27.503.300
						Belanja operasi	:	Rp 25.003.000			
						Belanja pegawai	:	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 25.003.000			
						Belanja bunga	:	Rp -			
						Belanja subsidi	:	Rp -			
						Belanja hibah	:	Rp -			
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -			
						Belanja modal	:	Rp -			
						Belanja tidak terduga	:	Rp -			
					Belanja transfer	:	Rp -				
X.XX.01.2.07	5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan		13 unit			Rp 80.497.250			13 unit Rp 338.546.975	
X.XX.01.2.07.0 5	1 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Kab. Pasuruan	2 unit			Rp 5.500.000	DAU		2 unit Rp 6.050.000	
						Belanja operasi	:	Rp 5.500.000			
						Belanja pegawai	:	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 5.500.000			
						Belanja bunga	:	Rp -			
						Belanja subsidi	:	Rp -			
						Belanja hibah	:	Rp -			
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -			
					Belanja modal	:	Rp				

X.XX.01.2.07.1 0					Belanja tidak terduga	:	Rp -				
					Belanja transfer	:	Rp -				
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Pasuruan	1 unit			Rp 50.000.000	DAU	1 unit	Rp 55.000.000
						Belanja operasi	:	Rp 50.000.000			
						Belanja pegawai	:	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 50.000.000			
						Belanja bunga	:	Rp -			
						Belanja subsidi	:	Rp -			
						Belanja hibah	:	Rp -			
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -			
						Belanja modal	:	Rp -			
	X.XX.01.2.07.1 1					Belanja tidak terduga	:	Rp -			
					Belanja transfer	:	Rp -				
3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Pasuruan	9 unit			Rp 24.997.250	DAU	9 unit	Rp 27.496.975
						Belanja operasi	:	Rp 24.997.250			
						Belanja pegawai	:	Rp -			
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 24.997.250			
						Belanja bunga	:	Rp -			
						Belanja subsidi	:	Rp -			
						Belanja hibah	:	Rp -			
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -			
						Belanja modal	:	Rp -			
						Belanja tidak terduga	:	Rp -			

					<i>Belanja transfer</i> :	Rp -			
X.XX.01.2.07.0 2	4 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	1 unit		Rp -	DAU	1 unit	Rp 250.000.000
					<i>Belanja operasi</i> :	Rp -			
					Belanja pegawai :	Rp -			
					Belanja barang dan jasa :				
					Belanja bunga :	Rp -			
					Belanja subsidi :	Rp -			
					Belanja hibah :	Rp -			
					Belanja bantuan sosial :	Rp -			
					<i>Belanja modal</i> :	Rp -			
					<i>Belanja tidak terduga</i> :	Rp -			
					<i>Belanja transfer</i> :	Rp -			
X.XX.01.2.08	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%		Rp 177.432.200		100%	Rp 195.175.420
X.XX.01.2.08.0 2	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	Kab. Pasuruan	36 rekening		Rp 99.982.200	DAU	36 rekening	Rp 109.980.420
					<i>Belanja operasi</i> :	Rp 99.982.200			
					Belanja pegawai :	Rp -			
					Belanja barang dan jasa :	Rp 99.982.200			
					Belanja bunga :	Rp -			
					Belanja subsidi :	Rp -			
					Belanja hibah :	Rp -			
					Belanja bantuan sosial :	Rp -			
					<i>Belanja modal</i> :	Rp			

X.XX.01.2.08.0 4					Belanja tidak terduga	:	Rp -					
					Belanja transfer	:	Rp -					
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	Kab. Pasuruan	12 bln			Rp 77.450.000	DAU		12 bln	Rp 85.195.000
						Belanja operasi	:	Rp 77.450.000				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 77.450.000				
						Belanja bunga	:	Rp -				
						Belanja subsidi	:	Rp -				
						Belanja hibah	:	Rp -				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -				
						Belanja modal	:	Rp -				
						Belanja tidak terduga	:	Rp -				
						Belanja transfer	:	Rp -				
X.XX.01.2.09	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		18 unit			Rp 111.534.369			18 unit	Rp 122.687.806	
X.XX.01.2.09.0 1	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	15 unit			Rp 74.999.100	DAU		15 unit	Rp 82.499.010	
						Belanja operasi	:	Rp 74.999.100				
						Belanja pegawai	:	Rp -				
					Belanja barang dan jasa	:	Rp 74.999.100					
					Belanja bunga	:	Rp -					
					Belanja subsidi	:	Rp -					

X.XX.01.2.09.0 9					Belanja hibah : Rp -					
					Belanja bantuan sosial : Rp -					
					Belanja modal : Rp -					
					Belanja tidak terduga : Rp -					
					Belanja transfer : Rp -					
		2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Kab. Pasuruan	3 unit	Rp 16.497.669	DAU		3 unit	Rp 18.147.436
						Belanja operasi : Rp 16.497.669				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 16.497.669				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
	X.XX.01.2.09.1 0					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -					
					Belanja transfer : Rp -					
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Kab. Pasuruan	2 unit	Rp 20.037.600	DAU		2 unit	Rp 22.041.360
						Belanja operasi : Rp 20.037.600				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 20.037.600				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				



2.08.02.2.01.0 2	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti rakor PUG	Kab. Pasurua n	80 orang	Rp 49.999.900	DAU		80 orang	Rp 54.999.890
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 49.999.900				
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp -				
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp 49.999.900				
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -				
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp -				
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -				
					<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -				
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				
2.08.02.2.01.0 3	3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Pasurua n	55 PD	Rp 21.998.928	DAU		55 PD	Rp 24.198.821
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 21.998.928				
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp -				
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp 21.998.928				
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -				
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp -				
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -				
					<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -				
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				



					Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
					Belanja transfer	:	Rp	-					
<b>2.08.03</b>	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase Kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan</b>		<b>100%</b>			<b>Rp</b>	<b>265.046.000</b>				<b>Rp</b>	<b>291.550.600</b>
2.08.03.2.01	1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		155 orang			Rp	81.810.000			155 orang	Rp	89.991.000
2.08.03.2.01.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti rakor tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan		154 orang			Rp	81.810.000	DAU, DAK NON FISIK PP-PA		154 orang	Rp	89.991.000
					Belanja operasi	:	Rp	81.810.000					
					Belanja pegawai	:	Rp	-					
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	81.810.000					
					Belanja bunga	:	Rp	-					
					Belanja subsidi	:	Rp	-					
					Belanja hibah	:	Rp	-					
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					
					Belanja modal	:	Rp	-					
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
					Belanja transfer	:	Rp	-					
2.08.03.2.02	2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani		110 orang			Rp	183.236.000			110 orang	Rp	201.559.600

2.08.03.2.02.0 1	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mengadu dan terlayani		110 orang	Rp 183.236.000	DAU		110 orang	Rp 201.559.600
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 183.236.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 183.236.000				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				
2.08.03.2.02.0 2	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan		24 Kecamatan	Rp -	DAK NON FISIK PP-PA		24 Kecamatan	Rp -
					<i>Belanja operasi</i> : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				

					Belanja modal	:	Rp				
							-				
					Belanja tidak terduga	:	Rp				
							-				
					Belanja transfer	:	Rp				
							-				
<b>2.08.06</b>	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan</b>		<b>100%</b>			<b>Rp</b>				<b>Rp</b>
							<b>161.342.100</b>				<b>177.476.310</b>
2.08.06.2.01	1 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti rakor Pelebagaan PHA		120 orang			Rp			120 orang	Rp
							114.342.250				125.776.475
2.08.06.2.01.0 2	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak di kabupaten		120 orang			Rp	DAU		120 orang	Rp
							114.342.250				125.776.475
							Belanja operasi	:	Rp		
							114.342.250				
							Belanja pegawai	:	Rp		
							-				
							Belanja barang dan jasa	:	Rp		
							114.342.250				
							Belanja bunga	:	Rp		
							-				
							Belanja subsidi	:	Rp		
							-				
							Belanja hibah	:	Rp		
							-				
							Belanja bantuan sosial	:	Rp		
							-				
							Belanja modal	:	Rp		
							-				
							Belanja tidak terduga	:	Rp		
							-				
							Belanja transfer	:	Rp		
							-				
2.08.06.2.02	2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		24 kecamatan			Rp			24 kecamatan	Rp
							46.999.850				51.699.835

2.08.06.2.02.0 2	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		300 orang	Rp 46.999.850	DAU, DBHCHT		300 orang	Rp 51.699.835
					Belanja operasi : Rp 46.999.850				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 46.999.850				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
2.08.07	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 159.851.540</b>				<b>Rp 175.836.694</b>
2.08.07.2.02	1 <i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>jumlah pelaksana penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</i>		<i>24 kecamatan</i>	<i>Rp 159.851.540</i>			<i>24 kecamatan</i>	<i>Rp 175.836.694</i>
2.08.07.2.02.0 1	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mengadu dan terlayani		55 orang	Rp 148.851.640	DAU, DAK PP		55 orang	Rp 163.736.804
					Belanja operasi : Rp 148.851.640				
					Belanja pegawai : Rp -				

					Belanja barang dan jasa	: Rp 148.851.640			
					Belanja bunga	: Rp -			
					Belanja subsidi	: Rp -			
					Belanja hibah	: Rp -			
					Belanja bantuan sosial	: Rp -			
					Belanja modal	: Rp -			
					Belanja tidak terduga	: Rp -			
					Belanja transfer	: Rp -			
2.08.07.2.02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota tim PPT-PPA Kabupaten dan pokja kecamatan melaksanakan rakor pendampingan anak	70 orang		Rp 10.999.900	DAU	70 orang	Rp 12.099.890
					Belanja operasi	: Rp 10.999.900			
					Belanja pegawai	: Rp -			
					Belanja barang dan jasa	: Rp 10.999.900			
					Belanja bunga	: Rp -			
					Belanja subsidi	: Rp -			
					Belanja hibah	: Rp -			
					Belanja bantuan sosial	: Rp -			
					Belanja modal	: Rp -			
					Belanja tidak terduga	: Rp -			
					Belanja transfer	: Rp -			
2.14		<b>Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk</b>							
2.14.02		<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru</b>	<b>100%</b>		<b>Rp 35.000.000</b>			<b>Rp 38.500.000</b>



					Belanja operasi	:	Rp						
							5.500.000						
					Belanja pegawai	:	Rp						
							-						
					Belanja barang dan jasa	:	Rp						
							5.500.000						
					Belanja bunga	:	Rp						
							-						
					Belanja subsidi	:	Rp						
							-						
					Belanja hibah	:	Rp						
							-						
					Belanja bantuan sosial	:	Rp						
							-						
					Belanja modal	:	Rp						
							-						
					Belanja tidak terduga	:	Rp						
							-						
					Belanja transfer	:	Rp						
							-						
2.14.02.2.02.1 2	2 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan dalam dan pelkon yang tervalidasi	Kab Pasuruan	24 Laporan			Rp	24.000.000	DAU		24 Laporan	Rp	26.400.000
					Belanja operasi	:	Rp						
							24.000.000						
					Belanja pegawai	:	Rp						
							-						
					Belanja barang dan jasa	:	Rp						
							24.000.000						
					Belanja bunga	:	Rp						
							-						
					Belanja subsidi	:	Rp						
							-						
					Belanja hibah	:	Rp						
							-						
					Belanja bantuan sosial	:	Rp						
							-						
					Belanja modal	:	Rp						
							-						
					Belanja tidak terduga	:	Rp						
							-						
					Belanja transfer	:	Rp						
							-						
2.14.03	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru</b>		<b>100%</b>			<b>Rp</b>	<b>7.864.271.283</b>				<b>Rp</b>	<b>8.650.698.411</b>

2.14.03.2.01	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kecamatan yang diberikan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB		24 Kecamatan	1.563.730.340			24 Kecamatan	Rp 1.720.103.374
2.14.03.2.01.0 2	1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan KIE Program KKBPK	Kab. Pasuruan	160 orang	Rp 21.999.900	DAU		160 orang	Rp 24.199.890
						Belanja operasi : Rp 21.999.900				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 21.999.900				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
2.14.03.2.01.0 3	2	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah penyediaan dan distribusi sarana KIE Program KKBPK		12 bln	Rp -	DAK NON FISIK BOKB		12 bln	Rp -
						Belanja operasi : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				

					Belanja transfer	:	Rp						
							-						
2.14.03.2.01.0 7	3	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah kebutuhan pengelolaan operasional dan sarana balai kb	Kab. Pasuruan	12 bln		Rp 1.541.730.440	BOKB DAK		12 bln		Rp 1.695.903.484	
						Belanja operasi	:	Rp 1.541.730.440					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 1.541.730.440					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					
						Belanja hibah	:	Rp -					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp -					
						Belanja modal	:	Rp -					
						Belanja tidak terduga	:	Rp -					
						Belanja transfer	:	Rp -					
2.14.03.2.02	2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		24 Kecamatan		Rp 1.852.672.000			24 Kecamatan		Rp 2.037.939.200	
2.14.03.2.02.0 2	1	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah kebutuhan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB		2 jenis		Rp 34.672.000	DAK FISIK		2 jenis		Rp 38.139.200	
						Belanja operasi	:	Rp 34.672.000					
						Belanja pegawai	:	Rp -					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp 34.672.000					
						Belanja bunga	:	Rp -					
						Belanja subsidi	:	Rp -					

					Belanja hibah	: Rp	-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	-			
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			
					Belanja transfer	: Rp	-			
2.14.03.2.02.04	2 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang mendukung pelaksanaan program KB		2753 orang			Rp 1.818.000.000	DAU, DAK BOKB	2753 orang	Rp 1.999.800.000
					Belanja operasi	: Rp	1.818.000.000			
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp	1.818.000.000			
					Belanja bunga	: Rp	-			
					Belanja subsidi	: Rp	-			
					Belanja hibah	: Rp	-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	-			
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			
					Belanja transfer	: Rp	-			
2.14.03.2.03.03	3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksana layanan KB		24 Kecamatan			Rp 3.231.268.943		24 Kecamatan	Rp 3.554.395.837
2.14.03.2.03.01	1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi	Kab. Pasuruan	49 faskes			Rp 1.205.214.350	DAK NON FISIK BOKB	49 faskes	Rp 1.325.735.785

					Belanja operasi	: Rp					
							217.526.750				
					Belanja pegawai	: Rp	-				
					Belanja barang dan jasa	: Rp	217.526.750				
					Belanja bunga	: Rp	-				
					Belanja subsidi	: Rp	-				
					Belanja hibah	: Rp	-				
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				
					Belanja modal	: Rp	987.687.600				
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				
					Belanja transfer	: Rp	-				
2.14.03.2.03.03	2 Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan sosialisasi penggunaan KB MKJP	Kab. Pasuruan	500 orang		Rp	1.976.555.000	DAU, DAK NON FISIK BOKB		500 orang	Rp 2.174.210.500
					Belanja operasi	: Rp	1.976.555.000				
					Belanja pegawai	: Rp	-				
					Belanja barang dan jasa	: Rp	1.976.555.000				
					Belanja bunga	: Rp	-				
					Belanja subsidi	: Rp	-				
					Belanja hibah	: Rp	-				
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				
					Belanja modal	: Rp	-				
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				
					Belanja transfer	: Rp	-				
2.14.03.2.03.06	3 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah penyediaan sarana penunjang untuk pelayanan kb		3 unit		Rp	-	DAK FISIK KB		3 unit	Rp -

					Belanja operasi	: Rp	-			
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-			
					Belanja bunga	: Rp	-			
					Belanja subsidi	: Rp	-			
					Belanja hibah	: Rp	-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	-			
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			
					Belanja transfer	: Rp	-			
2.14.03.2.03.08	4	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah faskes yang mengikuti pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Kab. Pasuruan	44 faskes		Rp 16.499.800	DAU		44 faskes Rp 18.149.780
					Belanja operasi	: Rp	16.499.800			
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp	16.499.800			
					Belanja bunga	: Rp	-			
					Belanja subsidi	: Rp	-			
					Belanja hibah	: Rp	-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	-			
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			
					Belanja transfer	: Rp	-			
2.14.03.2.03.11	5	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor/ peserta KB yang terlayani	Kab. Pasuruan	300 orang		Rp 32.999.793	DAU		300 orang Rp 36.299.772
					Belanja operasi	: Rp	32.999.793			
					Belanja pegawai	: Rp	-			

					Belanja barang dan jasa	: Rp 32.999.793			
					Belanja bunga	: Rp -			
					Belanja subsidi	: Rp -			
					Belanja hibah	: Rp -			
					Belanja bantuan sosial	: Rp -			
					Belanja modal	: Rp -			
					Belanja tidak terduga	: Rp -			
					Belanja transfer	: Rp -			
2.14.03.2.04	4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah pelaksana pemberdayaan dan peningkatan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB	24 Kecamatan		Rp 1.216.600.000		24 Kecamatan	Rp 1.338.260.000
2.14.03.2.04.0 3	1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang melaksanakan program bangga kencana	24 Kecamatan		Rp 1.216.600.000	DAK NON FISIK BOKB	24 Kecamatan	Rp 1.338.260.000
					Belanja operasi	: Rp 1.216.600.000			
					Belanja pegawai	: Rp -			
					Belanja barang dan jasa	: Rp 1.216.600.000			
					Belanja bunga	: Rp -			
					Belanja subsidi	: Rp -			
					Belanja hibah	: Rp -			
					Belanja bantuan sosial	: Rp -			
					Belanja modal	: Rp -			
					Belanja tidak terduga	: Rp -			
					Belanja transfer	: Rp -			

2.14.04	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>Persentase Dimensi Ketentraman</b>		<b>20,20%</b>					<b>665.500.000</b>
		<b>Persentase Dimensi Kemandirian</b>		<b>17,68%</b>					-
		<b>Persentase Dimensi Kebahagiaan</b>		<b>13,89%</b>					<b>24.200.000</b>
2.14.04.2.01	1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		500 orang				500 orang	Rp 665.500.000
2.14.04.2.01.0 2	1 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengadaan sarana poktan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		20 unit		Rp -	DAK FISIK KB	20 unit	Rp -
						Belanja operasi : Rp -			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp -			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
2.14.04.2.01.0 5	2 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kebutuhan operasional bagi poktan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		10 desa		Rp -	DAK NON FISIK BOKB	10 desa	Rp -



2.14.04.2.02	2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi masyarakat yang melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga	24 Kecamatan	Rp 22.000.000			24 Kecamatan	Rp -
2.14.04.2.02.01	1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah organisasi masyarakat yg melakukan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Tribina,PIK-R dan UPPKS)	24 Kecamatan	Rp -	DAU		24 Kecamatan	Rp -
					Belanja operasi : Rp -				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
2.14.04.2.02.04	2	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	250 orang	Rp 22.000.000	DAU		250 orang	Rp 24.200.000
					Belanja operasi : Rp 22.000.000				
					Belanja pegawai : Rp -				

					Belanja barang dan jasa	:	Rp	22.000.000				
					Belanja bunga	:	Rp	-				
					Belanja subsidi	:	Rp	-				
					Belanja hibah	:	Rp	-				
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
					Belanja modal	:	Rp	-				
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
					Belanja transfer	:	Rp	-				
					Total Belanja operasi	:	Rp	13.527.486.083				
					Belanja pegawai	:	Rp	3.156.096.729				
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	10.371.389.354				
					Belanja bunga	:	Rp	-				
					Belanja subsidi	:	Rp	-				
					Belanja hibah	:	Rp	-				
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
					Total Belanja modal	:	Rp	987.687.600				
					Total Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
					Total Belanja transfer	:	Rp	-				
					<b>Total Belanja PD</b>	:	<b>Rp</b>	<b>14.515.173.683</b>				<b>Rp</b>
												<b>16.216.691.051</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dari awalnya tahun 2021 sesuai di Renstra Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan terdapat Program sejumlah 6 dan Kegiatan sebanyak 36 kegiatan. Namun, di pertengahan tahun 2020 terdapat kebijakan dari pusat untuk nama program dan kegiatan harus sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 050 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sehingga Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan setelah melakukan pemetaan tersebut, di tahun 2021 terdapat 8 program, 21 kegiatan dan 44 sub kegiatan sesuai dengan 2 urusan, yakni urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berikut ini program dan kegiatan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3 Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  - 5 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 9 Pengadaan Mebel
  - 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6 Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 15 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 16 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

### **2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

- 8 Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- 17 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- 19 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- 20 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (\*kegiatan evaluasi PUG 2 tahun sekali, 2023 tidak ada)
- 9 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 21 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

### **3. Program Perlindungan Perempuan**

- 10 Kegiatan Pencegahan Kekekrasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 22 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 11 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekekrasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 23 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekekrasan Kewenangan Kabupaten/Kota

### **4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

- 12 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 24 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 13 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 25 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### **5. Program Perlindungan Khusus Anak**

- 14 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 26 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 27 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

## **BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**

### **6. Program Pengendalian Penduduk**

- 15 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 28 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
- 16 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- 29 Perumusan Parameter Kependudukan
- 30 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

#### **7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

- 17 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - 31 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal
  - 32 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
  - 33 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
- 18 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - 34 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
  - 35 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 19 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
  - 36 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - 37 Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - 38 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
  - 39 Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
  - 40 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- 20 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - 41 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

#### **8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

- 20 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - 42 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)
- 21 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - 43 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - 44 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Untuk program, kegiatan serta sub kegiatan dan outputnya yang dilaksanakan juga menyesuaikan sesuai dengan tema arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Di tahun 2022 ini adalah tema “Kelembagaan Ekonomi Desa”, Dinas Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan sebagai OPD Pendukung pelaksanaan kelembagaan ekonomi desa dengan proses pendukung Pelayanan KB yg berkualitas & Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. Nantinya kegiatan-kegiatan tersebut berfokus pada 24 kecamatan dan ada yang di tingkat Kabupaten Pasuruan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Pemerintah Daerah pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2022, disusun sesuai dengan aturan dan urutan penyusunan usulan kegiatan. Dalam kegiatan Musrenbang baik dari Tingkat Desa, kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu prioritas pembangunan di masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Bupati terkait dengan urusan keluarga berencana dan pengendalian penduduk serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam pelaksanaan Renja SKPD di tahun 2022 perlu memperhatikan output, outcomes dan hasil yang direncanakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di Tahun 2022 adalah "Kelembagaan Ekonomi Desa" serta menyesuaikan tupoksi dinas. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai OPD pendukung pelaksana arah kebijakan pembangunan dengan proses pendukung Pelayanan KB yang berkualitas serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nantinya kegiatan-kegiatan tersebut berfokus pada 24 kecamatan dan ada yang di tingkat Kabupaten Pasuruan.

Rencana Tindak Lanjut dari usulan Renja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 ini akan dipertimbangkan untuk dapatnya dipakai acuan dalam menentukan porsi anggaran Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam RAPBD tahun 2022, sehingga Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mendapatkan porsi anggaran yang berimbang untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator) Bupati Pasuruan.

Mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF